

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik Cet Ke- III*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Diana Halim Koencoro. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2004.
- Fathoni Abdurrahman, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Bandung, 2006.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Irawan Soejito. *Pengawasan Terhadap Peraturan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*. Bina Aksara, Jakarta. 1983.
- Maringan Masry Simbolon. *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2004.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2011.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Visimedia Pustaka. Jakarta. 2014.
- Siswanto Sunarto. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Sinar Grafika. Makasar. 2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014.
- Soewarno Handyaningrat. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. 1990.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Suriansyah Murhaini. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2014.
- Uniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negeradan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung. 2009
- Victor. M. Situmorang. dan Jusuf Juhir. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Yogyakarta. 1994.

B. JURNAL

Fitria, Jurnal Ilmu Hukum: *Karakteristik Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Vol. 7 No. 3, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. 2014.

Mardian Saputra. Jurnal Administrasi. *Pengawasan Perizinan Depot Air Minum Di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. JOM FISIP Vol. 4 No. 2. Universitas Riau. 2017.

Ivan Fauzani Raharja dan Ratna Dewi, *Jurnal Tentang Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2013.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Kualitas Usaha depot air minum.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Usaha depot air minum.

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi jo Peraturan Walikota Jambi Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Mengganti Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016

Tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya

D. BAHAN HUKUM LAINNYA

Lampiran Data dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020.

<http://www.kajianpustaka.com/2014/04/depot-air-minum-isi-ulang.html>, diakses pada 22 Juli 2020.

Wawancara bersama kepala seksi pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi. Pada 03 Juli 2021.

Wawancara bersama Pemilik depot air minum Provinsi Jambi. Pada 20 Juni 2021.

Wawancara bersama salah satu masyarakat Provinsi Jambi. Pada 29 Juni 2021.